

# LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2023



**PT BPR BKK MUNTILAN (Perseroda)  
KABUPATEN MAGELANG**

**Jl. Raya Magelang - Yogyakarta Km. 10 Mungkid 56512.  
Tlp 0293-587808/782089**

# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

## PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

666071-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-601478-24012024120254

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

itbkkmuntilan@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-24 12:02:54



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.



**Perbarindo**

1 message

**Perbarindo** <noreply@perbarindo.org>  
To: itbkkmuntilan@gmail.com

Thu, Feb 1, 2024 at 10:47 AM



**PERBARINDO**  
DEWAN PENGURUS PUSAT  
PERHIMPUNAN BANK PERKREDITAN RAKYAT INDONESIA

**TANDA TERIMA**

No.1646/GCG/DPP-PERBARINDO/II/2024

Kepada Yth,  
PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)  
Jl. Raya Magelang-Yogyakarta Km. 10 Mungkid, Kabupaten Magelang

KETERANGAN
Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) telah menerima Laporan Tata Kelola (GCG) tahun 2023 dari PT BPR BKK Muntilan (Perseroda) dalam bentuk Softcopy

Tanda terima ini adalah merupakan bukti sah atas pengiriman Laporan Tata Kelola (GCG) BPR /BPRS yang di kirim melalui sistem SIP PERBARINDO

Jakarta, 01 Februari 2024

PERBARINDO



Fokus Memberdayakan Usaha Mikro, Kecil & Menengah

**TANDA TERIMA**

No.1646/GCG/Media-BPR/II/2024

Kepada Yth,  
PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)  
Jl. Raya Magelang-Yogyakarta Km. 10 Mungkid, Kabupaten Magelang

KETERANGAN
Majalah MediaBPR-Perbarindo, telah menerima Laporan Tata Kelola (GCG) tahun 2023 dari PT BPR BKK Muntilan (Perseroda) dalam bentuk Softcopy

Tanda terima ini adalah merupakan bukti sah atas pengiriman Laporan Tata Kelola (GCG) BPR /BPRS yang di kirim melalui sistem SIP PERBARINDO

Jakarta, 01 Februari 2024

MediaBPR-PERBARINDO

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : Jl. Raya Magelang - Yogyakarta Km. 10 Mungkid

Nomor Telepon : 0293587808

Penjelasan Umum : Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT, Laporan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 mengacu pada prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Agustinus Subekti Rahyuwono, SE	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Menetapkan, melangkah, memantau bank telah mengikuti sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Mematuhi komitmen, menjaga budaya kepatuhan, melakukan pencegahan kebijakan yang menyimpang dari peraturan maupun perundang-undangan yang berlaku.
2	Mulyono, SE	Direktur	Terselenggarakannya kegiatan bank dalam bidang pemasaran dana maupun kredit, tercapainya aktiva produktif yang optimal, perlindungan konsumen, APU PPT, dan menghindari praktek-praktek yang merugikan bagi BPR dan mengurus & mengelola bank dengan baik.

#### Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Tidak lanjut seluruh rekomendasi dari dewan komisaris sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan untuk pencapaian kinerja dengan peningkatan kompetensi serta penyesuaian struktur organisasi. Direksi membuat rencana tindak penanganan kredit bermasalah berikut penyebab dan upaya yang telah dilakukan kemudian melakukan evaluasi setiap bulan melalui laporan dan evaluasi kinerja bulanan. Direksi berkomitmen untuk pencapaian kinerja tahun 2024 dapat diraih sesuai rencana dengan harapan pencapaian kinerja baik volume usaha penyaluran kredit dan penghimpunan dana serta penurunan NPL dapat direalisasikan sesuai yang termuat dalam RBB.

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direksi melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja dan penurunan NPL secara berkala mencakup pencapaian target sesuai RBB dan penyelesaian kredit bermasalah serta langkah-langkah pembinaan dan pemberian sanksi dengan konsisten dan rutin setiap awal bulan dengan pemberian target personal kepada pegawai serta penilaian kinerja pegawai (KPI).

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Sukarno, SH, MM, M.Kom	Komisaris Utama	Komisaris Utama
2	Dra. Siti Zumaroh, MM	Komisaris	Anggota Komisaris

#### Rekomendasi Kepada Direksi

1. Dewan komisaris menyetujui RBB 2023 dengan perbaikan atau recovery yang didominasi bidang kredit dengan catatan Komitmen pelaksanaan kebijakan yang diambil dan merealisasikan program kerja yang disusun baik target aset, damas, kredit, pendaptan, biaya, laba serta indikator keuangan sesuai dengan target yang ditetapkan. 2. Mengulas capaian kinerja masing-masing cabang melalui evkin dan pembinaan. 3. Memprioritaskan kinerja 3 cabang NPL terbesar, Melibatkan seluruh PE untuk pengawalan kinerja, Pencapaian laba sesuai target, Direksi mengambil langkah perbaikan kinerja dengan penyegaran organisasi dengan rolling/ rotasi SDM. 4. Pemenuhan temuan OJK sesuai dengan ketentuan. 5. Merekomendasikan untuk inovasi ekspansi kredit dan pemanfaatan teknologi informasi untuk pemasaran produk. 6. Pesetujuan Pengadaan pegawai agar sesuai dengan Pergub No. 12 tahun 2019, Laporan tahunan, Tata kelola, pemberian THR. 7. Pemantauan likuiditas bank menghadapi lebaran. 8. Pemantuan kinerja kredit. 9. Evkin tahun 2021 dan pesetujuan RBB 2022. 10 Persetujuan pemberhentikan PE. 11. Persetujuan susuan organisasi tahun 2022. 12. Persetujuan pengangkatan PE. 13. Persetujuan pengadaan inventaris. 14. Persetujuan penghasilan pengurus dan pegawai.

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rapat Dewan Komisaris dilakukan 6 kali tahun 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

### BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak memiliki

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

**BPR tidak memiliki komite**



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

**BPR tidak memiliki komite**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

**Direksi tidak memiliki saham di BPR**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

**Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Agustinus Subekti Rahyuwono, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Mulyono, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Agustinus Subekti Rahyuwono, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Mulyono, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

**Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR**

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Sukarno, SH, MM, M.Kom	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Dra. Siti Zumaroh, MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Sukarno, SH, MM, M.Kom	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Dra. Siti Zumaroh, MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	3	285089280	2	253044000
2	Tunjangan	3	779907908	2	12652200
3	Tantiem	3	111815025	2	32934985
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	3	80553200	2	44282700
	Total		1257365413		342913885

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Sesuai yang di tetapkan RUPS dan masa jabatan direktur utama berakhir pada tanggal 18 Oktober 2023 sehingga jumlah direksi menjadi 2 (dua) orang.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2	Transportasi	Mobil Dinas	Tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	BPJS	Tidak ada
4	Fasilitas lainnya	Tidak ada	Tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Sesuai yang di tetapkan RUPS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4,77	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,06	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,25	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,01	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	3,36	1

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Gaji pegawai terendah sesuai dengan UMK Kabupaten Magelang

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	14-01-2023	2	1. Evaluasi RBB 2022. 2. Arahan Kebijakan pada RBB tahun 2023. 3. Evaluasi pogram Task Force.
2	04-02-2023	2	1. Evaluasi Kinerja Januari 2023. 2. Pembahasan hasil audit KAP dan Tutup Buku 2022. 3. Korekksi RBB 2023.
3	08-04-2023	2	1. Evaluasi Kinerja TW I 2023. 2. Tanggapan surat pembinaan laporan realisasi dan pengawasan RBB 2023. 3. Arah dan kebijakan kredit relaksasi paska POJK stimulus covid-19 berakhir.
4	08-07-2023	2	1. Evaluasi Kinerja TW II 2023. 2. SDM. 3. Laporan akhir masa jabatan Direktur Utama.
5	22-07-2023	2	Pembahasan Penerapan APU PPT.
6	04-08-2023	2	Pembahasan tindakan fraud.
7	19-08-2023	2	Pembahasan kinerja menjelang akhir masa jabatan Direktur Utama.
8	29-08-2023	2	Evaluasi kinerja dan komitmen perbaikan kinerja Direktur utama.
9	02-09-2023	2	Pembahasan rencana tindak lanjut persiapan implementasi SAK EP.
10	27-09-2023	2	Pembahasan penunjukan KAP untuk tutup buku 2023.
11	13-10-2023	2	Evaluasi kinerja TW III 2023.

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pelaksanaan rapat dalam 1 tahun dilakukan 10 kali dan dihadiri oleh seluruh dewan komisaris.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Sukarno, SH, MM, M.Kom	6	5	100,00
2	Dra. Siti Zumaroh, MM	6	5	100,00

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pelaksanaan rapat dalam 1 tahun dilakukan 11 kali dan dihadiri oleh seluruh dewan komisaris

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	1	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		1		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

### Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Sdr. SUKARNO, SH, MSi, M.Kom. sebagai Komisaris Utama diangkat berdasar RUPS-LB tanggal 18 Desember 2019 dan Sdri Dra Siti Zumaroh MM berdasar RUPS-LB 28 Desember 2020.
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) dan Direksi sebanyak 2 (dua)
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Sdr. SUKARNO, SH, MSi, M.Kom. sebagai Komisaris Utama, lulus Fit and Proper Test OJK dengan surat Nomor: SR-168/KR.0313/2019 tanggal 22 November. Dra Siti Zumaroh MM berdasar RUPS-LB 28 Desember 2020.
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Provinsi yang sama yaitu Sdr. SUKARNO, SH, MSi, M.Kom bertempat tinggal di Kota Semarang dan Dra Siti Zumaroh MM tinggal di Kabupaten Magelang.
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen;  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Nihil
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Dewan Komisaris sudah mempunyai pedoman dan tata tertib kerja.
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Dewan Komisaris tidak ada yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) BPR, atau sebagai Direksi, atau pejabat eksekutif, dan / atau Bank Umum.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	2	Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Bank belum memiliki Komisaris independen karena modal inti BPR kurang dari Rp 50 milyar.
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	1,44	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,72	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi pada rapat pengurus dan evaluasi Kinerja.
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dewan Komisaris dalam melakukan Pengawasan selalu memberi pengarahannya, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional utamanya pemutusan kredit kecuali kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi selalu menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan OJK atau Otoritas lainnya hal ini tercermin dari setiap tindak lanjut dilaporkan kepada Dewan Pengawas.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Pengawas telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal hal ini terlihat kehadiran ke BPR baik kantor Pusat ataupun Kantor Cabang untuk melakukan pengawasan dan / atau rapat pengurus/Dewan Komisaris.

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis selalu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan tidak ada yang tidak tercapai kata mufakat.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Anggota Dewan Komisaris bisa melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan dan dibuatkan notulen rapat.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan		Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	0	
	Total nilai skala penerapan	0		
	Rata-rata	0,00		
	Bobot	0,50		
	Nilai struktur	0,00		
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	0	
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	0	
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	0	
	Total nilai skala penerapan	0		
	Rata-rata	0,00		
	Bobot	0,40		
	Nilai Proses	0,00		
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	0	
	Total nilai skala penerapan	0		



Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	BPR sudah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur mengenai benturan kepentingan. Keputusan atas benturan kepentingan dilakukan dengan rapat Direksi dan Pejabat terkait dengan mengungkap benturan kepentingan serta memberikan pendapat /alasan masing-masing anggota rapat.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Jika ada benturan kepentingan dalam pengambilan kebijakan Antara Komisaris, Direksi dan pejabat Eksekutif selalu dirapatkan dan eksekusi sesuai hasil keputusan rapat.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Jika terjadi benturan kepentingan yang dapat mengurangi keuntungan BPR selalu dirapatkan dan diputuskan serta diungkapkan dalam risalah rapat dan sudah terdokumentasikan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

## Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.04.00

## Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;  b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan  c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	2	Pada SOP Struktur Organisasi Direksi yg membawahi fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Secara umum Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagian besar telah memahami peraturan OJK dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	2	Struktur Organisasi sudah ada dan sudah ditunjuk oleh Direksi pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan bebas dari fungsi operasional.
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	SOP yang mengatur tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau pejabat Eksekutif sudah dibuat dan telah di isi pejabat eksekutif di semenjak bulan Desember tahun 2017.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	



Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah melaksanakan sosialisasi ketentuan akan tetapi masih perlu ditingkatkan.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah melaksanakan pencegahan dan menjaga komitmen akan tetapi masih perlu ditingkatkan.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang telah dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan,
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah melakukan review memastikan seluruh ketentuan, prosedur dan kegiatan usaha BPR telah atau merekomendasikan pengkinian akan tetapi masih perlu ditingkatkan.
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	2,40	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,96	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	Tingkat pelanggaran sudah mengalami penurunan tercermin dari hasil audit OJK diketahui tingkat pelanggaran semakin berkurang.

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah membuat laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala ke Direktur Utama tembusan dikirim ke Dewan Komisaris.
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan belum menemukan kebijakan yang menyimpang.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	BPR sudah memiliki SKAI dengan personil sebanyak dua orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	SKAI telah memiliki Pedoman kerja secara tersendiri, telah dikinikan pada tahun 2022 dan telah disetujui Direksi dan Dewan Komisaris.
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	SKAI dalam melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana.
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	SKAI bertanggung jawab langsung ke Direktur Utama tercermin dari struktur organisasi dan setiap Hasil audit SKAI dilaporkan langsung ke Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	Untuk 2022 tidak ada program rekrutmen anggota SKI disebabkan terbatasnya SDM yang ada namun untuk pengembangan SDM terkait dengan fungsi audit intern dengan mengikut sertakan pendidikan dan pelatihan.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	BPR sudah menerapkan fungsi audit intern sesuai ketentuan namun hasilnya belum optimal karena keterbatasan jumlah SDM sehingga audit dilakukan sekali setahun di Kantor pusat atau Cabang.

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	0
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Cakupan atas pelaksanaan audit intern secara umum sudah memadai .
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	BPR telah meningkatkan mutu keterampilan SDM secara berkelanjutan dengan mengikuti pendidikan/pelatihan.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	SKAI selalu menyampaikan Laporan hasil audit kepada Dirut, Komisaris dan tembusan kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan .
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus tahun 2023 baru disusun dan akan dilaporkan ke OJK.
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	0



Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	2	Tahun 2023 tidak ada pengangkatan dan pemberhentian pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern ke OJK.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP, telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik dan komunikasi antara OJK dengan KAP .
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang telah terdaftar di OJK dengan mendapat persetujuan Dewan Pengawas serta memperoleh persetujuan RUPS.
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter ke OJK.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil Audit dan management letter yang telah disampaikan kepada BPR, tepat waktu namun belum menggambarkan permasalahan BPR secara lengkap dan rinci.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh OJK.

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	2	BPR telah menunjuk pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan manajemen risiko mulai pada bulan Desember 2019.
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR sudah memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko.
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	BPR sudah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pengelolaan risiko.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	2	<p>a. BPR sudah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko.</p> <p>b. evaluasi untuk memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi telah dilakukan.</p>



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Konisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manjemen Risiko, mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan mengevaluasi transaksi yang membutuhkan persetujuan Komisaris.
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	BPR telah melakukan Identifikasi dan Pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	BPR sudah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh terlihat dari hasil yang belum optimal.
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Pada prinsipnya BPR sudah menerapkan sesuai ketentuan OJK namun belum seluruhnya sehingga hasilnya belum optimal.
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR sudah mempunyai sistim informasi yang memadai sehingga informasi yang tersaji sudah lengkap, akurat, terkini dan utuh.
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Direksi telah melakukan pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM namun dalam pelaksanaannya belum secara kontinyu dan berkesinambungan.
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR sudah menyusun laporan profil resiko dan dilaporkan ke OJK.
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Penggunan Brancles sudah dilaporkan kepada Ojk.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPR telah memiliki Pedoman Kebijakan tentang BMPK dan monitoring dan penyelesaian terpisah dari PKPB.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR secara berkala telah mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK telah dikinikan pada tahu 2023.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	3	Pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait/debitur besar secara umum telah memenuhi ketentuan OJK tentang BMPK akan tetapi masih perlu ditingkatkan dalam dalam prinsip kehati-hatian.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Tidak terdapat pelanggaran pemberian kredit kepada pihak terkait/yang melanggar/melampaui BMPK
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR tidak melanggar BMPK.

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	



Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Rencana bisnis tahunan yang disusun telah sesuai visi dan misi BPR serta disetujui Dewan Komisaris
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis tahunan sudah memenuhi cakupan sesuai ketentuan OJK.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Pemegang saham mendukung sepenuhnya rencana bisnis yang disusun bank dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
Total nilai skala penerapan		6	
Rata-rata		2,00	
Bobot		0,50	
Nilai struktur		1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Penyusunan rencana bisnis BPR sudah mempertimbangkan faktor eksternal dan internal melalui analisis SWOT, azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko, namun dalam pelaksanaannya harus ditingkatkan.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan Pengawas telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis dengan cara datang langsung ke kantor pusat / cabang untuk mengawasi/mengevaluasi dalam forum evaluasi atau rapat koordinasi, pengawasan setiap semester dilakukan hasilnya dilaporkan ke OJK.
Total nilai skala penerapan		4	
Rata-rata		2,00	
Bobot		0,40	
Nilai Proses		0,80	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis dan perubahannya yang dibuat setiap tahun selalu disampaikan ke OJK sesuai ketentuan yang berlaku.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Sistem pelaporan keuangan sepenuhnya sudah didukung oleh sistem informasi manajemen (SIM), sedangkan pelaporan non keuangan belum seluruhnya didukung sistem informasi manajemen yang memadai.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Penyusunan laporan publikasi setiap triwulan sudah sesuai ketentuan OJK.
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Penyusunan laporan tahunan sudah sesuai dengan ketentuan OJK termasuk opini dari akuntan publik juga dilampirkan.
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR dalam melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah sudah berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan OJK.
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR dalam menyusun dan menyajikan laporan sudah sesuai ketentuan OJK.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

**Posisi Laporan** : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi selalu ditandatangani paling sedikit oleh 1 anggota Direksi dan dilaporkan ke OJK tepat waktu sesuai ketentuan .
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Pengaduan dan penyelesaian pengaduan telah dilaporkan OJK.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	



Form B.11.00

## Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR BKK Muntilan (Perseroda)

Posisi Laporan : 31 Desember 2023



**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BKK MUNTILAN (PERSERODA)  
KABUPATEN MAGELANG**

Jl. Raya Magelang -Yogyakarta KM 10 Telp.(0293) 587808 Mungkid 56512

Nomor : 0014/BPR BKK/M/II/2024

Mungkid, 8 Januari 2024

Lamp. : 1 (Satu) bendel

Kepada Yth.

Kepala Kantor Regional 3 Jateng & DIY

Otoritas Jasa Keuangan

Jl. Kyai Saleh No. 12 - 14

di-

Semarang

Perihal : Penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola BPR

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, bersama ini kami sampaikan Laporan penerapan Tata Kelola dan Laporan Penilaian Sendiri ( Self Assesment) PT BPR BKK Muntilan(Perseroda) periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, beserta tanda terima laporan dari Asosiasi BPR (Perbarindo Pusat) dan Media Ekonomi BPR sebagaimana terlampir.

Kemudian untuk menjadikan periksa.

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BKK MUNTILAN (Perseroda)  
KABUPATEN MAGELANG  
Pit Direktur Utama



Agustinus Subekti Rahyuwono, S.E.  
Direktur Umum & YMF Kepatuhan

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Dewan Komisaris PT BPR BKK Muntilan (Perseroda);
2. Peringgal.



**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BKK MUNTILAN (PERSERODA)  
KABUPATEN MAGELANG**

Jl. Raya Magelang -Yogyakarta KM 10 Telp.(0293) 587808 Mungkid 56512

Nomor : 0015/BPR BKK/M/II/2024

Mungkid, 8 Januari 2024

Lamp. : 1 (Satu) bendel

Kepada Yth.

PERBARINDO

Komplek Patra no. 46 Jl Jendral Ahmad Yani

Bypass Cempaka Putih Jakarta Pusat

di-

JAKARTA

Perihal : Penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola BPR

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, bersama ini kami sampaikan Laporan penerapan Tata Kelola dan Laporan Penilaian Sendiri ( Self Assesment) PT BPR BKK Muntilan(Perseroda) periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, beserta tanda terima laporan dari Asosiasi BPR (Perbarindo Pusat) dan Media Ekonomi BPR sebagaimana terlampir.

Kemudian untuk menjadikan periksa.

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BKK MUNTILAN (Perseroda)  
KABUPATEN MAGELANG  
Pit Direktur Utama



Agustinus Subekti Rahyuwono, S.E.  
Direktur Umum & YMF Kepatuhan

Tembusan.:

1. Pertinggal.

# Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola BPR

## Profil BPR

Nama BPR	PT BPR BKK MUNTILAN(Perseroda)
Alamat BPR	JL Raya Magelang - Yogyakarta KM.10 Mungkid Magelang
Posisi Laporan	Desember, 2023
Modal Inti BPR	Rp29.505.662.027
Total Aset BPR	Rp256.951.243.076
Bobot Faktor BPR	B

### Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,39	0,26	-	0,20	0,22	0,20	0,05	0,20	0,17	0,15	0,19	2,02
Predikat Komposit	Baik											

#### Kesimpulan

Setelah melihat hasil penilaian secara keseluruhan penerapan tata kelola di PT BPR BKK (Perseroda) Muntilan cukup memadai sesuai dengan ketentuan, namun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu di disempurnakan khususnya penyaluran dana mengingat NPL masih cukup tinggi.

### BAB III

#### PENUTUP

Laporan Penerapan Tata Kelola BPR mengacu pada prinsip "TARIF" pada dasarnya merupakan seluruh proses kerja (business process) PT BPR BKK Muntilan(Perseroda) selama satu tahun melalui pendekatan pemberdayaan seluruh Sumber Daya yang ada di BPR sehingga diupayakan tidak terdapat data/informasi strategis dan signifikan yang tertinggal. Namun demikian jika dikemudian hari ditemukan data/informasi penting yang belum dilaporkan, maka akan segera dilakukan up date terhadap Laporan ini.

Mungkid, 8 Januari 2024

PT BPR BKK MUNTILAN(Perseroda)  
KABUPATEN MAGELANG



Dra Siti Zumaroh, MM.  
Komisaris



Plt Direktur Utama

Agustinus Subekti R, SE.  
Direktur Umum & Kepatuhan